

# The Effect of Education, Health and Per Capita Income on Poverty Rate in Maluku Province

Erni Salong\*, Muhammad Bugis, Izaac Tonny Matitaputty, & Fahrudin Ramly

Pattimura University, Ambon, Indonesia

---

## Abstract

Poverty is a common phenomenon that occurs in all countries and at all times. This study aims to determine the factors that allegedly affect poverty in Maluku Province such as the level of education, health and per capita income. Data obtained from the Central Statistics Agency in the form of data on average length of schooling (RLS), life expectancy (AHH), per capita income and poverty rate. The method used is multiple linear regression. The results showed that RLS had a significant negative effect on the poverty rate while AHH and per capita income had a negative and significant effect on reducing the poverty rate.

*Keywords:* Life expectancy, Poverty, Economic growth, Average length of school.

---

## 1. Pendahuluan

Pembangunan telah mengalami pergeseran makna dari yang menitik beratkan aspek ekonomi semata telah bergeser kepada aspek kehidupan yang lebih luas yaitu mencakup aspek psikologis, sosial, politik, budaya, pendidikan ataupun kesehatan. Pendekatannya pada strategi pembangunan yang secara langsung dapat menghasilkan produk pembangunan yang menghargai martabat kemanusiaan seperti demokrasi, harga diri, dan kebebasan. Masalah ketimpangan menjadi rumit karena sering dikaitkan dengan keterbelakangan dan kemiskinan (Ramly, 2017).

Pembangunan pada negara-negara yang sedang berkembang lebih banyak didasari oleh teori pertumbuhan ekonomi dan merupakan aliran utama teori barat (mainstream economics) yang melahirkan gejala realitas sosial ekonomi sebagai hasil pembangunan itu sendiri yang tidak sesuai dengan harapan. Aspek ekonomi menjadi dominan dalam pemikiran pembangunan, akibatnya tujuan kemanusiaan atau pandangan kultural dan juga cita-cita ideologis-politis masih tetap dipandang rendah. Dalam banyak studi telah menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi dibarengi dengan ketimpangan dalam pembagian pendapatan, peningkatan dalam pengangguran serta meningkatnya kemiskinan absolut.

Kemiskinan sudah mulai intensif dikaji untuk menganalisis lebih dalam tentang factor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya kemiskinan di suatu Negara atau daerah. Banyak teori yang mencoba untuk menganalisis hal ini. Salah satu diantaranya adalah dikenal teori lingkaran perangkap kemiskinan (the vicious circle of poverty). Walaupun demikian teori ini mendapat kritikan dari Bauer yang tidak menerima pandangan yang dinyatakan dalam teori tersebut (Sukirno, 2010).

Provinsi Maluku termasuk daerah termiskin keempat di Indonesia setelah Nusa Tenggara Timur, Papua Barat dan tertinggi Provinsi Papua. Dibandingkan dengan tahun 2009 tingkat kemiskinan pada tahun 2022 turun drastis dari 28,23% menjadi 16,23%. Ini berarti upaya pengentasan kemiskinan sudah memperlihatkan kemajuan yang relative baik, walaupun masih diatas rata-rata nasional yaitu sebesar 9,57% pada tahun 2022 (Badan Pusat Statistik Maluku, 2023).

Banyak factor yang menjadi penyebab terjadinya kemiskinan disuatu Negara atau daerah. Beberapa diantaranya adalah tingkat pendidikan, kesehatan serta tingkat pendapatan sebagaimana yang disinyalir oleh Nurkse dalam teori perangkap kemiskinan. Semua ini membentuk sebuah lingkaran yang tidak berujung pangkal Berbagai studi menunjukkan hasil yang berbeda seperti Penelitian yang mengkaji pengaruh tingkat Pendidikan terhadap penurunan

---

\* Corresponding author.

E-mail address: [ernisalong73@gmail.com](mailto:ernisalong73@gmail.com)

kemiskinan secara signifikan dilakukan oleh Adriani dan Wahyudi (2015); Aswin dan Yasa (2021); Nurhasanah, dkk (2019); Susanto dan Pangesti (2019); Anugrah (2020); Ariasih dan Yuliarmi (2021); Adhitya dkk (2022); dan Chairunnisa dan Qintharah (2022). Sedangkan kajian yang menemukan sebaliknya adalah Herman (2018); Aini dan Nor Islamy (2021); Putra dkk, (2021).

Pengaruh tingkat Kesehatan terhadap penurunan tingkat kemiskinan dilakukan oleh Aini dan Nor Islamy (2021); Putra dkk, (2021). Kajian yang menemukan sebaliknya dilakukan oleh Anugrah (2020) Aswin dan Yasa (2021); Chairunnisa dan Qintharah (2022). Sedangkan pengaruh aspek ekonomi dilakukan oleh Nurhasanah, dkk (2019). Perbedaan hasil penelitian tersebut dapat disebabkan oleh kondisi daerah, struktur perekonomian daerah dan waktu penelitian.

## 2. Kajian Pustaka

Pengkajian tentang kemiskinan mulai dilakukan secara intensif sejak dekade 1970-an yang kemudian melahirkan konsep kemiskinan absolut yang dipakai secara luas. Konsep ini dimaksudkan untuk menentukan suatu batas pendapatan minimum yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan fisik minimum berupa makanan, pakaian serta perumahan yang dapat menjamin kelangsungan hidup seseorang.

Dari situlah kemudian ditelusuri faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya kemiskinan sekaligus menentukan kategorisasi kemiskinan. Kemiskinan dipengaruhi oleh sejumlah variabel yang kompleks dan tidak hanya terbatas pada faktor ekonomi, tetapi juga sistem sosial, politik dan nilai-nilai budaya yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Di Indonesia, masalah kemiskinan bukan merupakan gejala yang baru, melainkan sudah lama terjadi khususnya di Pulau Jawa. Ini berarti bahwa kemiskinan merupakan masalah kemanusiaan yang tidak bisa dipisahkan dari proses pembangunan yang dilaksanakan. Hal ini yang menyebabkan Presiden menginstruksikan agar pada tahun 2024 Indonesia mewujudkan tingkat kemiskinan ekstrim sebesar 0%.

Konsep kemiskinan yang digunakan dalam berbagai studi, antar institusi bahkan antar negara sangat bervariasi. Di Indonesia, pengukuran kemiskinan didasarkan pada konsep garis kemiskinan yang dipakai oleh Badan Pusat Statistik dengan mengacu kepada dimensi ekonomi yaitu ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar yang meliputi makanan dan non makanan (Badan Pusat Statistik, 2023).

Demikian pula dengan faktor-faktor yang menyebabkan, maka kemiskinan dapat terjadi karena beberapa hal. Menurut Surbakti (1995), kemiskinan dapat dibedakan menjadi:

- a. Kemiskinan kultural. Kemiskinan seperti ini bukanlah bersifat bawaan melainkan akibat dari ketidakmampuan menghadapi kemiskinan yang berkepanjangan sehingga timbul perasaan marginalitas, fatalisme, putus asa, ketergantungan dan inferioritas. Sikap-sikap tersebut diabaikan melalui proses sosialisasi dari generasi ke generasi. Pikiran ini sesuai dengan pandangan kaum konservatisme yang melihat orang miskin adalah kelompok sosial yang mempunyai budaya tersendiri (*culture of poverty*). Orang menjadi miskin karena ia tidak mau bekerja, boros, tidak mempunyai rencana, kurang berprestasi dan sebagainya (Rahmat, 1999)
- b. Kemiskinan sumberdaya ekonomi, melihat akar kemiskinan terletak pada ketidakpunyaan sumberdaya ekonomi, karena proses penghancuran dan hilangnya sumber-sumber ekonomi dengan cara eksploitasi. Eksploitasi ini mengambil bentuk seperti: pertukaran yang tidak adil dalam proses tukar menukar komoditi, pembayaran yang tidak adil atas jasa-jasa pekerja dan pengenaan pungutan yang relatif memberatkan dari penguasa terhadap rakyat kecil. Proses ini sudah berlangsung sejak lama, mulai dari zaman feodalisme kerajaan (baik kerajaan Hindu ataupun Islam), zaman kolonial Belanda dan akhirnya zaman pertumbuhan ekonomi sekarang ini. Akibatnya masyarakat miskin praktis tidak memiliki harta produktif (*productive asset*) atau harta yang bisa menimbulkan pendapatan (*earning asset*) yang akhirnya berada dalam lingkaran kemiskinan yang tidak berujung (*vicious circle of poverty*) yang dapat diuraikan sebagai berikut: Karena miskin maka penguasaan sumber ekonomi menjadi rendah, sehingga membuat kemampuan lemah. Oleh karena kemampuan lemah, maka kemiskinan timbul. Demikianlah seterusnya, lingkaran ini berjalan sehingga kemiskinan bertambah parah (Arief, 1990)
- c. Kemiskinan struktural, melihat bahwa yang menyebabkan kemiskinan adalah struktur ekonomi dan politik yang bukan hanya eksploitatif terhadap pihak yang kurang memiliki sumber daya tetapi juga berpihak hanya kepada pihak yang memiliki akses ekonomi dan politik. Pandangan ini diwakili oleh kaum radikal. Orang menjadi miskin karena memang dilestarikan untuk miskin.

## 2.1. Teori Perangkap Kemiskinan

Teori perangkap kemiskinan diperkenalkan oleh Nurkse (1953) yang mengemukakan bahwa kemiskinan bukan saja disebabkan oleh ketiadaan pembangunan pada masa yang lalu, tetapi juga terdapat sejumlah hambatan pada pembangunan di masa yang akan datang. Sehingga dikatakan bahwa suatu Negara jadi miskin karena ia merupakan Negara miskin (Sukirno, 2010).

Secara garis besar perangkap kemiskinan menyatakan bahwa lemahnya pendapatan riil menyebabkan rendahnya kemampuan menabung dan lemahnya kapasitas modal untuk investasi yang berdampak pada rendahnya produktifitas dan akhirnya menyebabkan lemahnya tingkat pendapatan (Nurjihadi dan Dharmawan, 2016). Atau dengan kata lain terdapat keadaan yang menyebabkan timbulnya hambatan terhadap terciptanya pembentukan modal yang tinggi. Disatu sisi pembentukan modal ditentukan oleh tingkat tabungan dan disisi yang lainnya ditentukan perangsang untuk menanam modal. Hal ini tidak dapat dilaksanakan dengan baik. Jadi terdapat dua jenis lingkaran setan yang menghalangi suatu Negara kesulitan dalam mewujudkan pembangunan yang pesat.

Sheperd et.al dalam Oluwatayo (2016) mengidentifikasi tiga factor utama yang menyebabkan munculnya kemiskinan seperti kurangnya aset, kurangnya partisipasi dalam pengambilan keputusan politik, ekonomi dan budaya serta kebijakan ekonomi makro yang merugikan kelompok masyarakat miskin. Nurjihadi dan Dharmawan (2016) dalam kajiannya di Nusa Tenggara Timur pada studi kasus petani tembakau menggambarkan model perangkap kemiskinan dimulai dari kepemilikan modal baik SDM, finansial serta SDA. Selanjutnya petani melakukan usaha kemitraan dengan perusahaan tembakau yang berusaha di daerah tersebut. Hubungan ini menyebabkan petani sangat tergantung kepada perusahaan tersebut sehingga posisi tawar menjadi lemah dalam transaksi perdagangan. Akibat selanjutnya adalah rendahnya pendapatan petani.

Kondisi ini membuat petani tidak bisa membayar hutang sehingga terjadi debt trap, akibatnya tidak terjadi akumulasi modal. Pada sisi yang lain, rendahnya modal dan menumpuknya hutang, maka petani kembali lagi mengusahakan usaha taninya dengan berhutang kepada perusahaan mitranya. Pola ini melingkar yang membuat petani tidak bisa keluar dari lingkaran kemiskinan.

## 2.2. Teori Perangkap Keseimbangan Tingkat Rendah

Teori ini pertama kali diperkenalkan oleh Richard R. Nelson pada tahun 1956 dalam tulisannya pada jurnal American Economic Review (diakses pada 5 Oktober 2023). Secara garis besar teori ini berbicara tentang keterkaitan antara pertumbuhan penduduk, pendapatan nasional dan pendapatan perkapita serta akumulasi modal. Ketiga hal ini saling berhubungan sehingga masyarakat kembali dalam kemiskinan.

Nelson menyatakan bahwa pada saat pendapatan per kapita meningkat, maka mendorong jumlah penduduk meningkat. Akan tetapi pada saat batas tingkat pertumbuhan penduduk tercapai, maka pendapatan per kapita meningkat bersamaan dengan turunnya jumlah penduduk. Jika tingkat pendapatan per kapita meningkat di atas tingkat tabungan dan investasi, maka akan meningkatkan jumlah penduduk. Pada gilirannya mendorong kembali turunnya pendapatan per kapita ke tingkat keseimbangan rendah (Pragyandeepa, 2023).

Dikatakan ada 5 kondisi yang menyebabkan terjadinya perangkap keseimbangan rendah yaitu:

- 1). Terjadi korelasi yang tinggi antara tingkat pendapatan per kapita dengan tingkat pertumbuhan penduduk.
- 2). Rendahnya kecenderungan kenaikan pendapatan per kapita untuk meningkatkan investasi per kapita.
- 3). Terbatasnya lahan produktif untuk lahan pertanian.
- 4). Metode produksi yang tidak efisien.
- 5). Kondisi social budaya dan kondisi ekonomi.

Nelson menggunakan tiga macam model hubungan dalam menggambarkan perangkap keseimbangan rendah yaitu:

- 1). Pendapatan ditentukan oleh persediaan modal, jumlah penduduk dan tingkat teknologi. Modal terdiri dari barang dan lahan dalam proses produksi. Perekonomian yang terjebak dalam perangkap keseimbangan rendah seringkali penggunaan input tidak dapat menghasilkan output yang maksimal.
- 2). Pertumbuhan penduduk. Pendapatan per kapita yang rendah menyebabkan perubahan jumlah penduduk. Perubahan disebabkan oleh tingkat kematian dan tingkat kematian disebabkan oleh perubahan tingkat pendapatan per kapita yang rendah. Tetapi pada saat pendapatan per kapita sudah mencapai tingkat tertentu, maka tidak lagi berpengaruh terhadap tingkat kematian.

Pembentukan modal bersih. Net investasi terdiri modal yang berasal dari tabungan. Modal bersumber dari pendapatan saat ini dengan mengurangi konsumsi dan jika lahan tidak digunakan, maka modal dapat ditingkatkan untuk mengolah lahan tersebut. Peningkatan jumlah lahan yang diolah berhubungan positif dengan pertumbuhan penduduk.

### 3. Metode Penelitian

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder kuantitatif yang dipublikasikan oleh lembaga pemerintah yang berkompeten seperti Badan Pusat Statistik Nasional (BPS) dan BPS Provinsi Maluku, serta instansi terkait lainnya. Data sekunder meliputi berbagai data sosial ekonomi terutama data kemiskinan, pendidikan, kesehatan dan pendapatan per kapita. Data tersebut dikumpulkan dengan metode kolektor. Artinya, data tersebut dikumpulkan dari terbitan berkala berupa buku, laporan dari lembaga pemerintah.

Model analisis yang digunakan adalah regresi linear berganda. Mengingat data penelitian ini tidak semuanya linear, maka dilakukan transformasi ke dalam bentuk logaritma sehingga dapat ditulis:

$$\ln Y = \alpha + \beta_1 \ln X_1 + \beta_2 \ln X_2 + \beta_3 \ln X_3 + \varepsilon$$

dengan:

- Y = Jumlah miskin
- X1 = Rata-rata lama sekolah
- X2 = Angka harapan hidup
- X3 = Pendapatan per kapita
- $\alpha$  = Konstanta
- $\beta_1, \beta_2,$  dan  $\beta_3,$  = elastisitas variabel tingkat pendidikan, tingkat kesehatan dan pendapatan per kapita terhadap tingkat kemiskinan.
- $\varepsilon$  = Kesalahan pengganggu (error term).

Untuk mencari nilai koefisien regresi (elastisitas pertumbuhan), maka digunakan metode OLS (Ordinary Least Squares). Metode penyelesaian ini dimaksudkan untuk memperoleh jumlah nilai kuadrat  $\varepsilon$  yang minimum. (Gujarati, 2003). Untuk menguji model hasil penelitian ini apakah termasuk baik (best fit model) atau BLUE (Best Linear Unbiased Estimator), maka dilakukan pengujian model dengan menggunakan beberapa teknik pengujian antara lain: Uji asumsi klasik yang terdiri dari koloniaritas, autokorelasi dan heterokedastisitas dan Uji kriteria statistik (signifikansi) seperti uji t, uji F dan R<sup>2</sup>.

### 4. Hasil dan Pembahasan

Hasil olah data penelitian ini diperlihatkan pada table 1.

**Tabel 1.** Hasil Olah Data

Model	Coefficients <sup>a</sup>										
	Unstandardized Coefficients			Standardized Coefficients Beta	T	Sig.	Correlations			Collinearity Statistics	
	B	Std. Error					Zero-order	Partial	Part	Tolerance	VIF
(Constant)	40.826	14.625		2.792	.014						
1 X1	-.245	.306	-.089	-.798	.438	-.748	-.209	-.060	.452	2.214	
X2	-8.826	3.582	-.478	-2.464	.027	-.940	-.550	-.185	.149	6.709	
X3	-.164	.071	-.434	-2.311	.037	-.934	-.525	-.173	.159	6.274	

a. Dependent Variable: Y

Sumber: Data Olahan, 2024

Berdasarkan hasil perhitungan pada tabel 1, maka model penelitian ini dapat ditulis kembali dalam persamaan ekonometrika sebagai berikut :

$$\ln Q = 40,826 - 0,245 \ln X_1 - 8,826 \ln X_2 - 0,164 \ln X_3$$

$$Se = (14,625) \quad (0,306) \quad (3,528) \quad (0,071)$$

$$t = 2,792 \quad -0,798 \quad -2,462 \quad -2,311$$

Melihat hasil perhitungan tersebut di atas, maka dapat diberikan pengertian untuk masing-masing nilai koefisien regresi atau nilai elastisitas variabel yang mempengaruhi tingkat kemiskinan sebagai berikut.

- 1). Nilai intersep  $\alpha = 40,826$  artinya jika tidak ada perubahan dalam pendidikan, kesehatan dan pendapatan per kapita maka tingkat kemiskinan minimum sebesar 40,826 satuan.
- 2). Nilai elastisitas tingkat pendidikan (rata-rata lama sekolah)  $\beta_1 = -0,245$  artinya jika terjadi perubahan dalam tingkat pendidikan (rata-rata lama sekolah) sebesar 1 persen, maka tingkat kemiskinan akan meningkat sebesar 0,245 persen dengan asumsi bahwa tidak ada perubahan tingkat kesehatan (angka harapan hidup) dan pendapatan per kapita.
- 3). Nilai elastisitas investasi  $\beta_2 = -8,826$  artinya jika terjadi perubahan pada tingkat kesehatan (angka harapan hidup) sebesar 1 persen, maka tingkat kemiskinan akan menurun sebesar 8,826 persen dengan asumsi bahwa tidak ada perubahan pada tingkat pendidikan (rata-rata lama sekolah) dan tingkat pendapatan per kapita.
- 4). Nilai elastisitas investasi  $\beta_3 = -0,164$  artinya jika terjadi perubahan pada tingkat pendapatan per kapita sebesar 1 persen, maka tingkat kemiskinan akan menurun sebesar 0,164 persen dengan asumsi bahwa tidak ada perubahan pada tingkat pendidikan (rata-rata lama sekolah) dan tingkat kesehatan (angka harapan hidup).

Untuk menguji apakah model hasil penelitian ini termasuk baik (best fit model) atau BLUE (Best Linear Unbiased Estimator) dan memenuhi syarat untuk pengujian hipotesis dan melakukan estimasi, maka dilakukan pengujian. Hasilnya menunjukkan bahwa tidak terdapat pelanggaran pada asumsi klasik baik multikolinieritas, menunjukkan bahwa nilai tolerance tidak ada yang lebih kecil dari 0,10 dan nilai VIF tidak ada yang lebih besar dari 10 yang menunjukkan bahwa hasil analisis regresi yang diperoleh bebas dari multikolinearitas (Rahmanta, 2009).

Demikian juga dengan uji Heteroskedastisitas (Heteroscedasticity) di mana residualnya tidak membentuk suatu pola tertentu, dengan kata lain residual cenderung konstan, sehingga dapat dikatakan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada hasil estimasi. Sedangkan uji Autokorelasi nilai Durbin Watson adalah sebesar 1,797 yang berada antara nilai  $dU < DW < 4 - dU$  yaitu  $1,69 < 1,797 < 4 - 1,69$  (2,31)

Hasil perhitungan pada table 1 menunjukkan bahwa untuk tingkat pendidikan (rata-rata lama sekolah) memiliki nilai  $\rho$  sebesar 0,438. Jika  $\alpha$  ditetapkan sebesar 5 persen, maka  $\rho$  lebih besar dari  $\alpha$ . sehingga disimpulkan bahwa tingkat pendidikan (rata-rata lama sekolah) berpengaruh negatif tetapi tidak signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pengaruh tingkat pendidikan terhadap kemiskinan bersifat negative namun tidak signifikan. Hasil ini bertentangan dengan teori ekonomi pembangunan pada umumnya yang berbicara tentang kemiskinan, seperti Nurkse yang menyatakan bahwa tingkat pendidikan dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Peningkatan sumber daya manusia suatu daerah akan meningkatkan produktivitasnya yang berpengaruh terhadap upah tenaga kerja.

Hasil ini sesuai dengan penelitian dari Aini & Islamy, (2021): Herman, (2018): Natari, (2022): Pradipta & Dewi (2020), Putra (2021), Susanto & Pangesti (2019). Hal ini menunjukkan bahwa tidak selamanya tingkat pendidikan berpengaruh negative dan signifikan terhadap penurunan tingkat kemiskinan. Hal ini dapat disebabkan oleh karakteristik perekonomian suatu daerah, seperti kondisi social atau budaya yang memiliki nilai bahwa bersekolah adalah untuk memperoleh pekerjaan sebagai PNS atau ASN. Nilai ini yang dapat menyebabkan munculnya pengangguran pada tingkat pendidikan yang tinggi. Ini berarti bahwa ijazah yang dimiliki tidak mampu untuk mendatangkan pendapatan bagi dirinya dan juga bagi orang lain.

Namun penelitian ini berbeda dengan Bakhtiari & Meisami, (2010): Adriani & Wahyudi, (2015): Annisa, Novita, & Khairil, (2021): Ariasih & Yuliarmi (2021), Aswin & Yasa (2021): Adam, et.al. (2022), demikian pula dengan penelitian dari Adhitya, et.al., (2022), Chairunnisa & Qintharah (2022), dan beberapa penelitian lainnya. Hal ini dapat menjelaskan bahwa kemiskinan tidak hanya dipengaruhi oleh tingkat pendidikan akan tetapi kemiskinan bersifat multidimensi sehingga mengkaji kemiskinan memerlukan keterlibatan berbagai disiplin ilmu.

Variabel tingkat kesehatan (angka harapan hidup) memiliki nilai  $\rho$  sebesar 0,027. Jika  $\alpha$  ditetapkan sebesar 5 persen, maka  $\rho$  lebih kecil dari  $\alpha$ . sehingga disimpulkan bahwa tingkat kesehatan (angka harapan hidup) berpengaruh negative dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Hasil penelitian ini memperlihatkan pengaruh tingkat kesehatan terhadap kemiskinan bersifat negative dan signifikan. Hal ini sesuai dengan teori lingkaran kemiskinan yang menyaranakan bahwa untuk keluar dari kemiskinan maka perbaikan kualitas sumber daya manusia menjadi syarat mutlak. Tingkat kesehatan yang baik memungkinkan orang bisa bertahan hidup lama, dapat bekerja dengan baik karena tidak sakit-sakitan, akhirnya tingkat produktifitasnya tinggi dan upah yang diterima juga tinggi.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian dari Bakhtiari & Meisami (2010), Adriani & Wahyudi (2015), Fikri & Suparyati (2017), Aini & Islamy (2021), Annisa, Novita, & Khairil, (2021), Natari (2022). Tetapi berbeda dengan penelitian Ariasih & Yuliarmi, (2021): Adhitya, et.al. (2022), Bahkan penelitian dari, justru perbaikan tingkat kesehatan justru menambah tingkat kemiskinan.

Keragaman hasil penelitian tersebut dapat disebabkan oleh kondisi awal tingkat kesehatan masyarakat yang masih rendah, sehingga perbaikan tingkat kesehatan berpengaruh terhadap produktifitasnya dan pendapatannya meningkat dan menurunkan kemiskinan. Sedangkan daerah dengan kondisi awal tingkat kesehatan yang sudah membaik, maka perbaikan tingkat kesehatannya tidak berpengaruh langsung terhadap tingkat kemiskinan.

Variabel tingkat pendapatan perkapita memiliki nilai  $p$  sebesar 0,037. Jika  $\alpha$  ditetapkan sebesar 5 persen, maka  $p$  lebih kecil dari  $\alpha$ . sehingga disimpulkan bahwa tingkat pendapatan per kapita berpengaruh negative dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Penelitian ini menemukan bahwa tingkat pendapatan per kapita akan menurunkan kemiskinan secara signifikan. Hal ini sesuai dengan teori ekonomi pembangunan pada umumnya, bahwa dengan peningkatan tingkat pendapatan per kapita masyarakat, maka akan meningkatkan daya beli atau terjadi peningkatan dalam pengeluaran. Masyarakat dapat memenuhi kebutuhan dasar minimalnya terutama makanan dan jika sudah terwujud, maka dapat ditingkatkan kepada jenis kebutuhan lainnya terutama kebutuhan non makanan.

Penelitian ini sesuai dengan penelitian Adriani & Wahyudi (2015), Demikian juga dengan penelitian yang dilakukan oleh Aini & Islamy (2021), Bakhtiari & Meisami (2010), Nurhasanah, et.al. (2019), Putra (2021), Namun berbeda dengan Chairunnisa & Qintharah (2022) yang menemukan pendapatan per kapita tidak berpengaruh terhadap penurunan kemiskinan di Jawa Barat.

Pengeluaran per Kapita di Provinsi Maluku mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, kecuali pada tahun 2020 saat terjadinya pandemic covid-19. Jika dibandingkan dengan garis kemiskinan yang besarnya Rp. 672.456,- per bulan, pada tahun 2022 sehingga pengeluaran dalam setahun adalah Rp. 672.456,- x 12 = Rp. 8.069.472,-. Sedangkan pengeluaran per kapita penduduk di Maluku adalah sebesar Rp. 8.876.000,- (Badan Pusat Statistik Maluku, 2023). Akan tetapi terlihat adanya ketimpangan social, yaitu sejumlah orang yang memiliki pengeluaran di atas pengeluaran per kapita dan sebagian besar yang memiliki pengeluaran di bawah pengeluaran per kapita, bahkan di bawah dari garis kemiskinan. Hal ini yang menyebabkan besarnya jumlah penduduk miskin di Provinsi Maluku.

Hasil perhitungan yang ditunjukkan pada table 1 nilai R sebesar 0,960 dan R<sup>2</sup> sebesar 0,921 atau 92,1 persen dapat disimpulkan bahwa tingkat pendidikan (rata-rata lama sekolah), tingkat kesehatan (angka harapan hidup) dan tingkat pendapatan per kapita memiliki kemampuan untuk menjelaskan pengaruh variasi perubahan ketiga variable tersebut terhadap variasi perubahan tingkat kemiskinan. Artinya tingkat kemiskinan ditentukan oleh tingkat pendidikan (rata-rata lama sekolah), tingkat kesehatan (angka harapan hidup) dan tingkat pendapatan per kapita sebesar 92,1 persen sedangkan sisanya sebesar 7,9 persen ditentukan oleh variable lain diluar model analisis.

Dari semua teknik pengujian yang digunakan maka dapat disimpulkan bahwa model regresi tersebut termasuk BLUE (Best Linear Unbeased Estimator) sehingga baik digunakan untuk melakukan estimasi atau peramalan.

## 5. Kesimpulan

Kemiskinan di Provinsi Maluku bersifat multidimensi. Tingkat pendidikan berpengaruh negative tetapi tidak signifikan terhadap penurunan jumlah penduduk miskin. sedangkan tingkat kesehatan dan tingkat pendapatan per kapita berpengaruh negative dan signifikan terhadap penurunan jumlah penduduk miskin. Perlu ada perubahan dalam orientasi pendidikan, dimana tamatan harus diarahkan untuk menciptakan kesempatan kerja minimal untu dirinya sendiri. Selain itu pelayanan kesehatan kepada masyarakat diperbaiki dan kebijakan penurunan ketimpangan social dan peningkatkan pendapatan masyarakat terutama golongan menengah ke bawah.

## References

Adhitya, B, dkk., 2022, Analisis Pengaruh Pendidikan, Kesehatan, Sanitasi dan Rata-Rata Jumlah Anggota Keluarga Per Rumah Tangga Terhadap Kemiskinan di Indoneisa, *Ekonomis: Journal of Economics dan Business*, Vol. 6. No. 1, 288 – 295.

- Adriani dan Wahyudi, 2015, Pengaruh Tingkat Pendidikan, Kesehatan dan Pendapatan Terhadap Kemiskinan di Provinsi Jambi, *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, Vol. 15. No. 2. 47 – 51.
- Aini dan Nor Islamy, 2021, Dampak Pengangguran, Pendidikan, Kesehatan PDRB dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Kemiskinan di Indonesia, *Journal of Economics Research and Policy Studies*, Vol. 1. No. 3. 132 – 141.
- Annisa, Novita dan Anwar Khairil, 2021, Pengaruh Tingkat Pendidikan dan Kesehatan Terhadap Kemiskinan (Studi Kasus Provinsi Aceh), *Jurnal Ekonomi Regional Unimal*, Vol. 04. No. 03, 1 – 6.
- Anugrah, F. 2020, Pengaruh Pendidikan, Kesehatan dan Standa Hidup Terhadap Kemiskinan Masyarakat Perkotaan (Survey pada Masyarakat Miskin Kecamatan Bojongloakaler Kota Bandung), *JBPE: Journal of Business and Political Economy*, Vol. 2. N. 1. 57 – 73.
- Ariasih, N.L.M, dan Yuliarmi, N.N, 2021, Pengaruh Tingkat Pendidikan, Tingkat Kesehatan dan Pengangguran Terbuka Terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Bali, *Cerdika: Jurnal Ilmiah Indonesia*, Vol. 1. No. 7. 807 – 825.
- Arief, S. 1990, "Dari Prestasi Pembangunan ke Ekonomi Politik: Kumpulan Karangan", UI – Press, Jakarta.
- Aswin, N. D. A dan Yasa Ny. M. 2021, Pengaruh Tingkat Pendidikan, Tingkat Kesehatan dan Pertumbuhan Penduduk Terhadap Tingkat Kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Bali, *E-Jurnal EP Unud*, Vol. 10. No. 11. 4535 – 4562.
- Badan Pusat Statistik, 2023, *Profil Kemiskinan di Indonesia Maret, 2023*. Jakarta.
- Badan Pusat Statistik, 2023, *Statistik Kesejahteraan Rakyat Maluku 2022*, Ambon
- Badan Pusat Statistik, 2023, *Maluku Dalam Angka 2023*, Ambon
- Bakhtiar, S dan Meisami, H., 2010, An Empirical Investigation of the Effect of Helath dan Education on Income Distribution and Poverty in Islamic Countries, *International Journal of Social Economics*, Vol. 37, Maret, 293 – 301.
- Chairunnisa, N.M., dan Qintharah, Y. N., 2022, Pengaruh Kesehatan, Tingkat Pendidikan dan Upah Minimum Terhadap Kemiskinan pada Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 – 2020, *Jurnal PETA*, Vol. 7. No. 1, 147 – 161.
- Fikri, R.O dan Suparyati, A, 2017, Pengaruh Pendidikan, Kesehatan dan Gender Terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Nusa Tenggara Timur, *Jurnal Media Ekonomi*, Vol. 25. No. 1, 43 – 56.
- Gujarati D., N., 2003, *Basic Econometrics*, Fourth Edition, McGraw-Hill Companies, Inc, The International Edition.
- Herman, 2018, Pengaruh Tingkat Pendidikan dan Jumlah Penduduk Terhadap Tingkat Kemiskinan di Kota Pekanbaru, *Equilibrium*, Vol. 6. No. 2. 161 – 169.
- <https://infobanknews.com.angka kemiskinan di Amerika Serikat>, diakses 16 Oktober 2023.
- <https://www.worldbank.org.poverty>, diakses tanggal 16 Oktober 2023.
- Natari, W. D., 2022, Pengaruh Pendidikan dan Kesehatan Terhadap Kemiskinan di Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Barat, *Jurnal Pembangunan dan Pemerataan*, Vol. 11. No. 3, 1 – 23.
- Nurhasanah dkk, 2019, Analisis Pengaruh Tingkat Pendidikan dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Jambi, *e-Jurnal Ekonomi Sumberdaya dan Lingkungan*, Vol. 8. No. 3/ 161 – 169.
- Nurjihadi, M., dan Dharmawan, A.H., 2016. Lingkaran Kemiskinan dalam Masyarakat Pedesaan, Studi Kasus Petani Tembakau di Kawasan Pedesaan Pulau Lombok, *Solidarity: Jurnal Sosiologi Pedesaan*, Agustus, hal 120 – 127.
- Oluwatayo, I.B., dan Ojo, A.O., 2016. "Is Africa's Dependence on Agriculture the Cause of Poverty Review. *The Journal of Developing Area*, 50 (1) hal 93 – 102.
- Pradipta, S.A dan Dewi, R.M. 2020, Pengaruh Rata-Rata Lama Sekolah dan Penganggran Terbuka Terhadap Kemiskinan, *Jurnal Pendidikan Ekonomi*, Vol. 8 No. 3, 109 – 115.

- Pragyandeepta, 2023. “ Nelson’s Theory of Low Level Equilibrium: Trapping, Equation and Explanation. <https://economicsdiscussion.net/theories/nelson-theory-of-low-level-equilibrium-trapping-equation-and-explanation/4650>.
- Putra, E.J, 2021, Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Kesehatan dan Pendidikan Terhadap Kemiskinan di Kabupaten Sidoarjo, *Bharanomics*, Vol. 1. No. 2, 51 – 60.
- Rahmanta, 2009, Aplikasi Eviews Dalam Ekonometrika, Modul, Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara
- Rahmat, J. 1999., “Sufisme dan Kemiskinan dalam Sekitar Kemiskinan dan Keadilan”: (Peny. Sr Edi Swasono), UI – Press, Jakarta.
- Ramly. Fahrudin., 2017. “Karakteristik Perekonomian Regional”, Pustaka Mandiri, Semarang.
- Sukirno. Sadono., 2010. “Ekonomi Pembangunan: Proses, Masalah dan Dasar Kebijakan”, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Surbakti, R. 1995., ”Dimensi-Dimensi Kemiskinan dan Strategi Pengentasan Kemiskinan. Dalam Perangkap Kemiskinan Problem dan Strategi Pengentasannya”, (ed: Bagong Suyanto), Airlangga University Press, Surabaya.
- Susanto, R dan Pangesti, I, 2019, Pengaruh Tingkat Pendidikan Terhadap Kemiskinan di DKI Jakarta, *Journal of Applied Business and Economics*, Vol. 5. No. 4. 340 – 350.